

dapat dengan mudah dilakukan kelompok itu sendiri dan tidak terlalu membutuhkan tenaga teknis dari luar kelompok itu. Jelas dalam arti kegiatan tersebut mempunyai tujuan yang jelas yang ingin dicapai. Skala kecil berarti tidak membutuhkan biaya yang besar. Usulan kegiatan memuat jenis kegiatan, penanggung jawab, jenis materi yang bisa disiapkan masyarakat dan jenis materi yang tidak bisa disiapkan masyarakat.

## **2. Pertimbangan usulan**

Setelah usulan kegiatan yang dibuat kelompok dan diketahui kepala desa, selanjutnya melalui FO disampaikan ke Tim Asistensi disertai data lapangan yang dibuat FO. Data lapangan tersebut memuat keterangan mengenai kondisi (menurut pengamatan FO) dari suatu kelompok yang mengajukan usulan kegiatan. Tim Asistensi kemudian melakukan konfirmasi. Konfirmasi yang pertama adalah antara Tim Asistensi dengan instansi terkait yang ada di kecamatan. Pada tahap ini Tim Asistensi mendiskusikan rencana mengenai konfirmasi yang akan dilakukan terhadap masyarakat. Dalam diskusi tersebut tim membahas poin-poin apa yang perlu diperhatikan dari kelompok yang mengajukan usulan kegiatan. Setelah itu, Tim Asistensi melakukan konfirmasi terhadap kelompok. Metode yang digunakan adalah dengan Forum Group Discussion (FGD) dengan kelompok dan meninjau langsung kondisi sesuai dengan usulan kegiatan yang diajukan. Hal-hal yang dikonfirmasikan adalah mengenai masalah, tujuan, seleksi kegiatan, pemanfaatan sumberdaya, komposisi kelompok, aturan-aturan/kesepakatan, keadilan dan kesinambungan dari kegiatan yang akan dilakukan.

Dari hasil konfirmasi dengan kelompok masyarakat, Tim Asistensi kemudian mendiskusikan hasil konfirmasinya dan menilai apakah usulan kegiatan tersebut layak, tidak layak atau kaji kembali. Untuk membuat pertimbangan terhadap usulan kegiatan terdapat tujuh kriteria penilaian yang dijadikan dasar yaitu: (1) hubungan analisa masalah dengan tujuan serta seleksi kegiatan di dalam usulan; (2) komposisi anggota dan tempat domisili; (3) partisipasi dan distribusi manfaat kegiatan secara adil di antara anggota; (4) sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan manajemen penggunaan dalam kelompok; (5) tingkat/ mutu pengetahuan dan kemampuan teknis yang dimiliki oleh anggota kelompok bagi implementasi dan manajemen kegiatan; (6) jadwal kegiatan; dan (7) keseimbangan antara input dengan peluang.

## **3. Pembuatan proposal rencana dukungan**

Jika hasil pengkajian Tim Asistensi menyatakan usulan kegiatan yang diajukan kelompok itu layak, maka Tim Asistensi kemudian membuat proposal rencana dukungan ke Tim Koordinasi. Sementara usulan kegiatan yang dianggap tidak layak atau kaji kembali tetap diinformasikan kembali kepada kelompok yang mengusulkan mengapa usulan kegiatannya belum dapat ditindaklanjuti.

Proposal rencana dukungan berisi judul kegiatan, tujuan, hasil yang diharapkan, jadwal kegiatan, input sumber daya, dan anggaran.

#### **4. Penilaian akhir dan pemutusan**

Setelah menerima proposal rencana dukungan dari Tim Asistensi, Tim Koordinasi kemudian melakukan rapat untuk membahas penilaian Tim Asistensi atas hasil konfirmasi terhadap kelompok yang mengajukan usulan kegiatan. Jika kegiatan yang diusulkan masih membutuhkan pertimbangan teknis maka Tim Koordinasi bersama dinas terkait akan melakukan konfirmasi kembali kepada kelompok, jika tidak maka yang dibicarakan adalah seberapa besar bentuk dukungan pemerintah/Sisduk terhadap kelompok.

#### **5. Penyediaan sumber daya**

Penyediaan sumber daya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya fisik, pengetahuan, dan keterampilan.

#### **6. Tindak lanjut**

Tindak lanjut adalah realisasi kegiatan oleh kelompok itu sendiri. Dengan adanya sumber daya dukungan dari Sisduk melalui Tim Asistensi, maka kelompok itu sendiri yang melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan tersebut.

Pemberian dukungan terhadap usulan kegiatan, melihat sejauhmana dukungan tersebut dapat menjadi *entry point* terhadap pemberdayaan masyarakat. Bentuk dukungan Sisduk terutama yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan. Namun, ada juga bentuk dukungan bersifat fisik sepanjang ada manfaatnya untuk

peningkatan kemandirian masyarakat dan sesuai prinsip pengajuan usulan kegiatan yang mudah, jelas dan skala kecil.

Akselerasi kegiatan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatori (*participatory approach*). Kegiatan ini identik dengan istilah persiapan sosial yaitu usaha-usaha yang dilakukan dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat dapat menerima program-program, agar program tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kemampuan masyarakat tersebut. Istilah *community development* sama dengan *community organizing* dan *capacity building* yaitu penyadaran, pengorganisasian dan peningkatan kemampuan masyarakat baik dalam hal keorganisasian maupun keterampilan-keterampilan.

Melalui program Sisduk, kabupaten yang terkenal dengan tradisi Maudu Lompo (Maulid Akbar) ini mampu mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat yang tercermin dari besarnya dana swadaya masyarakat yang melebihi dana yang dikeluarkan pemerintah. Terbukti, dari Tahun 2003 sampai 2006 dana yang dikeluarkan pemerintah untuk program Sisduk sebesar Rp7,9 miliar sedangkan dana swadaya/partisipasi masyarakat mencapai Rp11,59 miliar. Dana tersebut dipergunakan untuk membantu 17.957 Kepala Keluarga (KK) dan 3.017 kelompok masyarakat.

Untuk Tahun 2009, jumlah realisasi dana Sisduk dari pemerintah sebesar Rp1 miliar dan mampu membangkitkan dana swadaya masyarakat sebesar Rp1,69 miliar. Peruntukan dana tersebut bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari kegiatan bidang ekonomi seperti pengadaan pompa air untuk pertanian, pupuk, perikanan mesin alat tangkap, rumput laut, dan industri rumah tangga. Kegiatan bidang sarana dan prasarana seperti pengadaan air bersih, jamban keluarga, pengairan tersier, dan jalan tani/jembatan hingga kegiatan sosial seperti rehabilitasi masjid /mushalla, dan pembangunan TK/TPA.

**mekanisme Sisduk yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi pelaku pembangunan**

• • •



Keberadaan Sisduk telah membawa banyak perubahan di Kabupaten Takalar seperti tumbuhnya kelompok-kelompok di dalam masyarakat sebagai wadah kerjasama untuk memenuhi kebutuhan bersama. Secara kuantitas telah tumbuh kelompok baru dan penguatan kelompok yang telah ada sebelumnya yang hingga Tahun 2008 terbentuk sebanyak 4.653 kelompok.

Selain itu, Sisduk juga telah membawa perubahan pengetahuan masyarakat di Kabupaten Takalar seperti perubahan pola tanam dari para petani. Pola padi-padi-palawija yang merupakan pola lama dan cenderung tidak begitu menguntungkan petani mulai ditinggalkan karena petani beralih menggunakan pola tanam menjadi padi-palawija-palawija. Orientasi bercocok tanam pun bergeser. Dari yang semula hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga ke orientasi pasar.

Para pengrajin juga merasakan manfaat dari program Sisduk karena mendapatkan pengetahuan baru tentang bahan baku pembuatan anyaman yang lebih murah dan mudah diperoleh. Selain itu, mereka juga menerima informasi mengenai model-model baru sehingga dapat memproduksi lebih banyak produk dengan beragam model.

Perubahan pengetahuan yang membawa perubahan pola tanam bagi petani ternyata dapat meningkatkan pendapatan mereka. Pengurangan biaya produksi setidaknya merupakan tambahan penghasilan apalagi



Kegiatan fasilitasi kelompok tani perempuan oleh Field Officer

disertai peningkatan produksi dengan nilai jual yang lebih tinggi. Adapun bagi pengrajin, murahnya bahan baku dan aneka model produksi yang disertai dengan kemampuan membuka jaringan pasar yang lebih luas dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Mekanisme Sisduk yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi pelaku pembangunan ternyata dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah di satu sisi. Pada sisi lain, Sisduk meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat sekaligus mengarahkan masyarakat untuk memelihara hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. (andha\_85@yahoo.co.id)



## E-PROCUREMENT KABUPATEN LUWU UTARA



**Parameter** : Performa Politik  
**Kategori** : Akuntabilitas Publik  
**Isu strategis** : Transparansi

### Keterlibatan dalam Program

- a. Leading Sector : Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata
- b. Pelaku Program : Sekretariat Layanan e-Procurement
- c. Instansi yang Terlibat : Seluruh SKPD dan Unit Layanan Pengadaan (ULP)
- d. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata
- e. Pelaksana Program : Bidang Informatika Dinas KominfoBudpar
- f. Rekanan : Pemkot Surabaya (Lisensi *Software*) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

### Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Persiapan mulai dilakukan sejak Tahun 2005 seiring dengan dimulainya persiapan *e-government*. Setelah persiapan rampung, sosialisasi dan pelatihan bagi rekanan dilakukan pada pertengahan Tahun 2008. Pelelangan dimulai pada tahun 2009.

### Latar Belakang

Komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk mewujudkan *e-government for good governance* (penggunaan teknologi informasi demi tata kelola pemerintahan yang baik) sangat besar. Salah satu wujud dari komitmen tersebut adalah dengan membuat program e-procurement atau tender berbasis internet. Program ini diharapkan mendorong implementasi pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien, transparan, non diskriminatif, dan akuntabel.



# Menutup Rapat Pintu Masuk KKN

Laporan: Sundari Usman



Isu akuntabilitas, terutama transparansi, menjadi isu populer yang banyak mewarnai performa politik di daerah. Transparansi menjadi pagar utama dalam upaya pencegahan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Paling tidak dengan adanya kebijakan transparansi di daerah, semua pihak baik masyarakat maupun jajaran birokrasi akan saling mengawasi dalam menjalankan proses pemerintahan di daerah.

Seiring dengan pesatnya pembangunan di Luwu Utara (Lutra), pengadaan barang dan jasa di kabupaten tersebut terus mengalami peningkatan. Hal itu memicu bertambahnya jumlah penyedia barang dan jasa yang pada satu sisi berpotensi memicu tumbuh suburnya praktik-praktik KKN. Apalagi jika sistem pengadaan masih bersifat manual yang rawan terpengaruh faktor-faktor yang bersifat subjektif. Olehnya, Lutra kemudian melakukan terobosan dengan membangun sistem pengadaan barang dan jasa berbasis internet (*e-procurement*) sebagai langkah antisipatif pencegahan KKN.

*e-Procurement* adalah salah satu bagian dari *e-government* di mana *e-procurement* ini merupakan proses pemilihan pengadaan barang jasa milik pemerintah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dengan nilai pengadaan mulai dari Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

*e-Procurement* merupakan sistem informasi manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah yang didalamnya termasuk program berbasis web untuk memfasilitasi rangkaian proses pemilihan penyedia barang/jasa yang meliputi *e-tendering* dan *e-selection*. *e-Tendering* adalah pelelangan umum dalam rangka pengadaan barang/jasa yang prosesnya dilakukan secara elektronik dengan menggunakan media elektronik berbasis web. *e-Selection* adalah seleksi umum dalam rangka pengadaan jasa konsultasi yang prosesnya dilakukan secara elektronik.

Langkah awal pelaksanaan *e-procurement* dilakukan melalui penandatanganan kesepakatan atau *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara tentang Pelaksanaan dan Pengembangan Implementasi Sistem *e-Government*. Ruang lingkup kesepakatan bersama adalah keseluruhan sistem *e-government* yang meliputi sistem *e-budgeting*, *e-project*, *e-procurement*, *e-contracting*, *e-delivery*, *e-controlling*, *e-performance*, dan sistem lainnya.

Dengan *e-procurement* tidak ada lagi *face to face communication* (komunikasi tatap muka) antara rekanan dan pengguna barang/jasa. *e-Procurement* dapat mewujudkan tujuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efektif berupa jadwal penyelesaian proyek tepat waktu, efisien dengan penghematan anggaran daerah, transparan berupa mengakomodir tuntutan penyedia barang jasa, adil, tidak diskriminatif, dan akuntabel.

*e-Procurement* dilakukan di Sekretariat Layanan dan Unit Layanan



Loket pengambilan IKP

Pengadaan (ULP). Sekretariat Layanan *e-procurement* adalah sekretariat yang menyediakan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan *e-procurement* serta memantau kelengkapan persyaratan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dari Unit Layanan Pengadaan ke portal *e-procurement* yang berfungsi sebagai administrator sistem. ULP adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh bupati yang

bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. ULP terdiri dari penanggung jawab, koordinator utama, koordinator, dan gugus tugas pengadaan. Gugus tugas pengadaan bertugas melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

Seorang kontraktor yang ingin mengikuti tender awalnya harus registrasi *online* dengan mengisi lengkap data-data perusahaan. Setelah itu kontraktor harus mengikuti mekanisme sebagaimana tahap-tahap berikut ini:

### 1. Dokumen Perusahaan

- a. Sekretariat Layanan adalah tempat tujuan pertama kontraktor di mana kontraktor menyerahkan dokumen perusahaan untuk dimasukkan dalam database sistem. Di tempat ini kontraktor harus menyerahkan sendiri dokumen perusahaannya karena pada hari itu juga mereka akan diberikan Infrastruktur Kunci Publik (IKP) yang harus diterima sendiri oleh pemilik perusahaan (membawa Surat Kuasa jika diwakili oleh orang lain). Limit waktu registrasi tidak dibatasi namun jika rekanan tidak mendaftarkan data perusahaannya maka mereka tidak bisa ikut lelang sampai menunggu lelang selanjutnya, dan itupun juga rekanan harus mendaftar ulang.
- b. Setelah mereka menerima IKP, maka kontraktor sudah dapat melakukan penawaran via internet. Dengan kata lain, IKP adalah kunci bagi kontraktor untuk ikut dalam tender proyek melalui internet.

### 2. Dokumen Penawaran

- a. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara membuka pelelangan umum, yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas sekurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau surat kabar provinsi serta melalui *website* LPSE Kabupaten Luwu Utara.

- b. Gugus tugas pengadaan menyusun jadwal, menetapkan cara pelaksanaan, lokasi pengadaan, dan menyusun serta menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS)
- c. Kontraktor yang telah terdaftar melakukan penawaran proyek via internet di *website* LPSE Kabupaten Luwu Utara <http://lpse.luwuutara.go.id>.
- d. Kontraktor/rekanan mengisi formulir isian kualifikasi dan penawaran melalui portal *e-procurement*

### 3. Tahap Penilaian

Tahap penilaian melalui sistem gugur, sistem nilai, dan/atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.

Sistem gugur memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga melalui portal *e-procurement*.

Sistem nilai memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan nilai yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa serta pelaksanaannya. Nilai diinput pada portal *e-procurement* untuk dilakukan penghitungan dan pembandingan secara otomatis oleh sistem *e-procurement*.

Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis memberikan nilai pada unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai menurut umur ekonomis barang yang ditawarkan berdasarkan kriteria dan nilai yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa melalui portal *e-procurement*, kemudian nilai unsur-unsur tersebut dikonversikan ke dalam satuan mata uang tertentu, dan dibandingkan dengan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya.

### 4. Pemenang tetap disampaikan melalui internet. Rekanan yang gagal juga diumumkan lengkap dengan penjelasan kegagalannya.

Untuk memudahkan rekanan melakukan registrasi dan pengajuan penawaran di internet, pemda telah menyiapkan sekitar tujuh *hotspot* masing-masing di Sabbang, Baebunta, Masamba, kantor DPRD, kompleks perkantoran bupati, Mappadeceng, dan Bonebone. Pemenang disampaikan melalui internet. Rekanan yang gagal juga diumumkan lengkap dengan penjelasan kegagalannya. Guna menunjang ketersediaan informasi elektronik terkait dengan kebutuhan rujukan alat bukti, maka semua aktivitas perubahan data akan tersimpan dalam waktu tiga tahun di portal *e-procurement*.

Penerapan *e-procurement* Tahun 2009 berhasil menghemat anggaran pemda 11 persen atau sebesar Rp15,2 miliar. Dari Rp145,5 miliar yang dianggarkan untuk ditender ternyata penawaran rekanan

**penerapan *e-procurement*  
Tahun 2009 berhasil  
menghemat anggaran  
pemda 11 persen atau  
sebesar Rp15,2 miliar**

• • •

adalah Rp122,6 miliar dengan jumlah paket keseluruhan yang telah dilelang 208 paket dalam 17 putaran.

Selain itu, *e-procurement* dapat meminimalisasi kesalahpahaman, kecurigaan masyarakat, membantu proses pengendalian administrasi, memudahkan bagi peserta lelang untuk mengikuti semua tahapan lelang, memberi keadilan bagi peserta lelang, aman dan terhindar dari tuduhan KKN, karena panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa dapat mengetahui nama dan alamat penawar untuk masing-masing paket pekerjaan hanya pada saat setelah pembukaan sampul. (**andha\_85@yahoo.co.id**)



## PEMBANGUNAN ENERGI TERBARUKAN KABUPATEN ENREKANG



**Parameter** : Pengelolaan Lingkungan  
**Kategori** : Kelestarian Sumber Daya Alam  
**Isu Strategis** : Pengembangan Energi Alternatif Ramah Lingkungan

### Keterlibatan dalam Program

- a. Leading Sector : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Enrekang
- b. Pelaku Program : Masyarakat
- c. Instansi yang Terlibat : Lintas Sektor
- d. Penanggung Jawab : -Kepala Bidang Energi, Mineral, dan Migas  
-Kepala Seksi Ketenagalistrikan dan PJU
- e. Pelaksana Program : -Bidang Energi, Mineral, dan Migas  
-Seksi Ketenagalistrikan dan PJU
- f. Rekanan : LIPI, PNPM, BPPT, LSM dari Jerman

### Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan program dimulai sejak Tahun 2005 yang tersebar di 35 dusun dan 20 desa pada 9 kecamatan

### Latar Belakang

Krisis listrik merupakan masalah besar di Enrekang pada Tahun 2005. Sebanyak 5.597 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 40 desa dan 92 dusun, pada 9 kecamatan belum menikmati listrik. Pihak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kesulitan membangun instalasi hingga ke desa-desa karena medan bergunung dengan ketinggian rata-rata 1.300-1.500 meter di atas permukaan laut. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah daerah lalu berinisiatif membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) memanfaatkan potensi sungai berarus kuat yang banyak dimiliki Kabupaten Enrekang.



# Bahu-membahu Menerangi Gelap

Laporan: Ahmad Syam



**B**elasan murid kelas VI sekolah dasar (SD) di Desa Bungin, Kecamatan Bungin, Enrekang, malam itu berkumpul di rumah salah seorang guru mereka. Di bawah terang cahaya lampu listrik, mereka nampak serius memecahkan soal-soal matematika menjelang Ujian Nasional (UN) yang tidak lama lagi digelar.

Tidak jauh dari rumah tempat siswa belajar, masjid desa terlihat bertabur cahaya. Di masjid itu, sekitar dua puluh murid Taman Pengajian Alquran (TPA) yang dipandu empat guru mengaji memanfaatkan sela salat magrib dan isya untuk belajar membaca Alquran. Ramai suara anak-anak memecahkan sunyi malam, membasuh bukit-bukit, dan akhirnya menguap terbawa angin.

Masa-masa kegelapan tanpa penerangan lampu listrik memang berangsur meninggalkan Desa Bungin sejak *pilot project* Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) rampung pada Tahun 2005 lalu. Sejak itu, malam bukan lagi penghalang warga desa beraktivitas. Anak-anak bersemangat mengulang kembali pelajaran dari sekolah. Sebagian yang lain bergegas ke masjid belajar mengaji. Perangkat desa pun dapat menggelar pertemuan pada malam hari.

Perubahan drastis di Bungin dan sejumlah desa lainnya yang tersebar pada sembilan kecamatan awalnya dipicu persoalan krisis listrik Tahun 2005 lalu. Pada waktu itu, sekitar 5.648 rumah masih belum teraliri listrik. Faktor geografis dianggap penyebab utama terhambatnya pasokan listrik ke desa-desa tersebut. Sudah bukan rahasia bahwa sebagian besar desa di Enrekang terletak pada ketinggian 1.300-1.500 di atas permukaan laut. Dengan kondisi demikian tentu saja akan sangat menyulitkan PLN membangun infrastruktur dan jaringannya.

Setelah meneliti potensi sungai yang dimiliki Enrekang yang umumnya berarus kuat, Pemerintah Daerah Enrekang pun mulai membangun PLTMH Tahun 2005. PLTMH pertama dibangun di Desa Bungin berkapasitas 90 kilo watt dan mengaliri 168 unit rumah.

PLTMH adalah pembangkit listrik skala kecil yang mengubah potensial air menjadi kerja mekanis, memutar turbin dan generator untuk menghasilkan daya listrik (0-100 kilo watt). Di Enrekang, sungai berarus kuat dimanfaatkan sebagai potensial air yang dialirkan ke *power house* (bangunan pembangkit) di mana turbin dan generator di dalamnya akan bekerja untuk menghasilkan listrik. Karena itu, agar air sungai tetap stabil maka Pemerintah Daerah Enrekang berupaya keras menjaga kelestarian hutan, terutama di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS), memonitor penebangan pohon, dan mengawasi pembukaan lahan secara liar.

Setelah PLTMH Bungin, satu demi satu PLTMH lainnya dibangun. Jumlahnya hingga Tahun 2009 terbangun 13 unit dengan total kapasitas

produksi sebesar 676 kilo watt. Untuk membangun seluruh PLTMH tersebut Enrekang telah menggelontorkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebanyak kurang lebih Rp8,7 miliar. Selain mengandalkan APBD, Enrekang mendapatkan dana dari berbagai sumber sebesar kurang lebih Rp14,4 miliar seperti dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), PNPMM Mandiri, dan lain-lain.

Besarnya biaya yang dihabiskan untuk membangun PLTMH tidak sia-sia karena Enrekang mulai berhasil mengatasi krisis listrik. Dalam kurun waktu empat tahun jumlah rumah yang tidak teraliri listrik berangsur berkurang. Jika pada Tahun 2005 jumlah rumah yang belum menerima pasokan sebanyak 5.648 unit rumah maka pada Tahun 2009 turun menjadi hanya 1.347 unit rumah.

Jumlah rumah yang belum terlayani listrik sebagaimana menjadi target pemerintah daerah akan terus berkurang dari tahun ke tahun. Dalam rencana pembangunan PLTMH Tahun 2010-2012, jumlah unit yang akan dibangun sebanyak 7 unit dengan total kapasitas produksi 175 kilo watt dan akan mendistribusikan listrik ke sekitar 1.187 rumah.

#### REKAPITULASI KK YANG BELUM DAN TELAH MENIKMATI LISTRIK DI KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2005-2009

Jumlah KK yang Belum Menikmati Listrik		Jumlah KK yang Telah Menikmati Listrik			
Tahun 2005	Tahun 2009	Sumber Energi Listrik			TOTAL KK
		PLN	PLTS	PLTMH	
5648	1317	650	793	2888	4331

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Enrekang

Sumber pasokan listrik ke rumah-rumah di Enrekang bila dirinci juga menunjukkan bahwa sumber listrik alternatif masih yang lebih berperan. Data Tahun 2009 menggambarkan, Perusahaan Listrik Negara (PLN) melayani pasokan listrik untuk 650 unit rumah, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) memasok listrik pada 793 unit rumah, dan 2.888 unit rumah yang mendapatkan listrik dari jaringan PLTMH.

Keuntungan tambahan bagi masyarakat selain tersedianya listrik setelah terbangunnya unit-unit PLTMH adalah terciptanya sentra-sentra *home industry* (industri rumah tangga) pada desa-desa yang memiliki PLTMH. Pada siang hari PLTMH terus memproduksi listrik sementara penggunaan listrik tidak begitu besar



Kehadiran listrik menginspirasi aktivitas  
TPA pada malam hari

pada waktu itu. Agar listrik tidak terbuang percuma pemerintah daerah kemudian memfasilitasi masyarakat melalui penyediaan *home industry* seperti pengolahan kopi di Desa Ledan, minyak nilam di Potokullin, pengolahan pangan di Tanete, dan pengolahan kopi dan markisa di Parombean.

Pada setiap pembangunan unit-unit PLTMH, pemerintah daerah melibatkan partisipasi masyarakat dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pemeliharaan. Pemerintah daerah pada tahap perencanaan melakukan pertemuan dengan masyarakat untuk menentukan lokasi PLTMH dan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan PLTMH.

Partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan sangat beragam. Ada yang menghibahkan sebidang lahan dengan luas 12 meter untuk lokasi *power house* (bangunan pembangkit listrik), menyiapkan makanan untuk para pekerja, dan mengangkat bahan bangunan dan perangkat-perangkat instalasi seperti pipa dan tiang listrik. Ibu-ibu tidak hanya memasak, bersama-sama dengan anak-anak sekolah, mereka turut membantu mengangkat pasir. Menurut pengakuan Kepala Desa Parombean, Patti Nanti (45), dalam pelaksanaan pembangunan PLTMH Parombean ditaksir nilai partisipasi masyarakat sebagai pekerja senilai Rp30 juta.

Ketika pembangunan telah selesai tidak berarti partisipasi masyarakat juga selesai. Jika sebelumnya urusan pengelolaan dan pemeliharaan PLTMH adalah tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi, maka sekarang ini segala urusan pengelolaan dan pemeliharaan sudah ditangani Badan Usaha Desa (BUD). Pengurus BUD dan operator yang semuanya adalah masyarakat bertugas memelihara keberlangsungan mesin turbin, melakukan perawatan rutin, dan mengganti suku cadang mesin bila ada yang rusak. Pengurus BUD dan operator diupah yang anggarannya bersumber dari iuran bulanan masyarakat penerima manfaat PLTMH. Ketua diupah Rp300 ribu per bulan, sekretaris dan bendahara masing-masing Rp200 ribu per bulan, sedangkan tenaga operator menerima upah Rp500 ribu per bulan.

Iuran bulanan setiap Kepala Keluarga (KK) yang memanfaatkan aliran listrik bervariasi tergantung besar ampere pemakaian. Masyarakat juga membayar biaya pemasangan instalasi sebesar Rp300 ribu. Untuk pemakaian listrik 0.5 ampere iurannya sebesar Rp15 ribu, 1 ampere sebesar

**jika pada Tahun 2005 jumlah rumah yang belum menerima pasokan listrik sebanyak 5.648 unit rumah maka pada Tahun 2009 turun menjadi hanya 1.347 unit rumah**



Belajar kelompok di bawah penerangan listrik

Rp20 ribu, dan Rp35 ribu untuk pemakaian listrik 2 ampere. Namun demikian, meski ada penetapan tarif, terkadang pembayaran disesuaikan dengan kemampuan masing-masing KK. Bahkan karena pertimbangan kemampuan ekonominya, terdapat KK yang digratiskan.

**(ahmadsyam\_1@yahoo.com)**



## KAWASAN TANPA ROKOK KABUPATEN ENREKANG



**Parameter** : Pelayanan Publik  
**Kategori** : Kesehatan  
**Isu Strategis** : Sistem Perlindungan Kesehatan

### Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Program dimulai sejak Tahun 2001 namun berlaku secara efektif pada Tahun 2004 di Desa Bone Bone, Kecamatan Baraka. Pada Tahun 2009 dimulai upaya replikasi di dua desa pada kecamatan yang sama yakni, Kadinge dan Kenden.

### Keterlibatan dalam Program

- a. Leading Sector : Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang
- b. Pelaku Program : Masyarakat
- c. Instansi yang Terlibat : Lintas Sektor
- d. Penanggung Jawab :
  - Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
  - Kepala Bidang Promosi Kesehatan (Promkes)
- e. Pelaksana Program :
  - Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL)
  - Bidang Promosi Kesehatan (Promkes)

### Latar Belakang

Hak untuk menghirup udara bersih tanpa paparan asap rokok telah menjadi perhatian dunia, namun kenyataan pemaparan asap rokok semakin hari semakin bertambah jumlah perokok. World Health Organization (WHO) memperkirakan Tahun 2030 tingkat kematian dunia akibat konsumsi rokok akan mencapai 10 juta jiwa orang setiap tahunnya dan sekitar 70 persen di negara berkembang termasuk Indonesia. Kebiasaan merokok akan memperbesar faktor risiko penyakit degeneratif seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit paru, gangguan kehamilan, dan risiko terjadinya gangguan fungsi reproduksi.



# Inspirasi Sehat dari Desa Bebas Rokok

Laporan: Ahmad Syam



Siang yang cerah. Langit di atas Desa Bone Bone terlihat begitu biru. Angin sejuk berhembus dari pegunungan dan hutan yang mengelilingi desa yang terletak pada ketinggian 1.300-1.500 meter di atas permukaan laut itu. Sesekali terdengar tawa dan canda dari sekitar 30 warga yang mengikuti pertemuan perencanaan program desa di kantor desa, bangunan yang dulunya rumah panggung yang kemudian disulap jadi kantor.

Kepala Desa Bone Bone, Muhammad Idris, yang memimpin pertemuan. Karena ruangan pertemuan tidak begitu luas, sebagian warga duduk di tangga dan kolong kantor. Tidak terlihat seorang pun warga yang merokok meski iklim agak dingin dan juga tersuguh kopi panas *arabika typica*, sejenis kopi khas Bone Bone yang pernah meraih peringkat pertama pemilihan kopi tingkat nasional pada Tahun 2008 lalu. Di Bone Bone memang tidak berlaku asumsi bahwa iklim dingin dan segelas kopi harus ditemani sebatang rokok.

Lima tahun terakhir semua warga di Desa Bone Bone berhenti merokok karena desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Baraka tersebut menjadi Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Inisiator KTR di desa berpenduduk kurang lebih 793 jiwa (data desa Tahun 2009) tersebut tidak lain sang kepala desa.

Idris memulai kampanye anti rokok di desanya pada Tahun 2001. Hal yang menguatkan tekadnya adalah fenomena yang berlangsung di Bone Bone saat itu. Kebiasaan merokok bukan hanya menjadi kebiasaan para orang dewasa tetapi juga mulai digemari anak-anak yang baru berumur delapan tahun.

Banyak rintangan yang menghadang pria lulusan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alaudin (sekarang Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar) tersebut yang mengharuskannya berjuang selama empat tahun untuk membuat masyarakat warga Bone Bone berhenti merokok. Akhirnya, ajakan Idris membuahkan hasil pada Tahun 2005.

Pria yang juga pernah bekerja di Malaysia sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) itu mengajak warga desanya meninggalkan rokok dengan argumen yang bisa diterima, atau, setidaknya bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bone Bone.

Misalnya, dengan tidak merokok, uang yang biasanya digunakan membeli rokok bisa untuk biaya sekolah anak-anak mereka. Argumen lainnya, masyarakat diberi pemahaman bahwa merokok selain membahayakan kesehatan juga berdampak pada pengeluaran. Contohnya, setiap ada hajatan selalu dianggarkan biaya rokok bagi para tamu sehingga mempengaruhi belanja/pengeluaran.



Stiker imbauan larangan merokok di gedung kantor bupati

tersebut. Bahkan sang bupati akhirnya juga ikut berhenti merokok sejak Tahun 2008.

Melihat semangat masyarakatnya untuk hidup bebas dari rokok, pemerintah daerah (pemda) kemudian memberikan apresiasi yang besar. Salah satunya dengan membuat program replikasi KTR pada dua desa lainnya, yakni Desa Kadinge dan Desa Kenden yang juga masih bagian dari wilayah Kecamatan Baraka.

Pada replikasi KTR di desa tersebut, kepala desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama membuat *Memorandum of Understanding* (MoU). Dasar MoU menjadi payung hukum penerapan KTR di dua desa itu. Meski demikian, secara mendasar penerapan KTR di dua desa replikasi dan di Desa Bone Bone berbeda.

Perbedaannya, Desa Bone Bone adalah kawasan bebas rokok di mana seluruh aktivitas yang berhubungan dengan rokok termasuk perdagangan rokok di larang sama sekali. Sementara pada dua desa replikasi, karena masih dalam tahap sosialisasi lebih condong pada konsep pembatasan rokok dan kegiatan merokok. Pembatasan merokok diberlakukan pada sarana-sarana publik, termasuk di kantor-kantor desa dan kecamatan.

Selain mengupayakan replikasi, pemerintah daerah juga mengencakan program diseminasi informasi tentang bahaya rokok pada setiap kantor instansi pemerintah. Beragam selebaran yang ditempel di dinding atau spanduk yang dibentangkan yang

• • •

setelah penetapan pembatasan merokok di kantor-kantor SKPD tanggal 19 Februari 2010, seluruh staf yang ingin merokok harus ke *smoking area* atau *smoking room*



mengimbau untuk tidak merokok pada seluruh kantor instansi pemerintah. Isi selebaran dan spanduk bervariasi. Ada imbauan yang agak klasik seperti, "Maaf, Dilarang Merokok di Dalam Ruangan Ini!" Juga ada imbauan yang menyertakan sanksi bagi si pelanggar, misalnya, "Merokok di Kantor Ini Didenda Rp10.000".

Bagaimana staf kantor atau tamu kantor merespons peraturan tersebut? Setelah penetapan pembatasan merokok di kantor-kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tanggal 19 Februari 2010, seluruh staf yang ingin merokok harus ke *smoking area* atau *smoking room*. Bila kantor bersangkutan tidak memiliki fasilitas tersebut maka staf yang hendak merokok diharuskan berada di luar gedung kantor.

Langkah-langkah pengembangan program KTR yang telah dicanangkan Pemda Enrekang, baik dalam bentuk replikasi dan diseminasi informasi, selanjutnya dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintahan Daerah Enrekang Tahun 2009-2013.

Dalam rencana program Dinas Kesehatan Enrekang, penetapan KTR pada Tahun 2011 sudah meliputi satu kecamatan yakni Baraka. Artinya, pada Tahun 2011 nanti seluruh desa di Kecamatan Baraka akan menerapkan KTR.

Pada Tahun 2012 ditargetkan enam kecamatan menjadi kawasan tanpa rokok. Kemudian pada akhir Tahun 2013 seluruh kecamatan yang berjumlah 12 kecamatan telah menjadi KTR.

Beberapa langkah sebagai persiapan pengembangan KTR antara lain penyusunan kerangka konsep dan materi teknis terkait KTR. Juga dilakukan advokasi terhadap para pengambil kebijakan. Selain itu, juga dibuatkan regulasi yang nantinya mengatur pengembangan KTR. Saat ini pemerintah daerah, melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang

sedang menggodok rancangan peraturan daerah (ranperda) KTR.

**Jenis Penyakit yang Berhubungan dengan Perilaku Merokok dan Tren Penurunan Jumlah Kasusnya di Enrekang**

Jenis Penyakit	2007	2008	2009
Pneumonia	247 kasus	218 kasus	174 kasus
PPOK	58 kasus	55 kasus	52 kasus
Jantung	50 kasus	62 kasus	43 kasus
Stroke	21 kasus	18 kasus	9 kasus

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang

Program pengembangan KTR telah memperlihatkan pengaruh positif bagi perbaikan kesehatan di Enrekang. Data menunjukkan bahwa program berbasis masyarakat tersebut mempengaruhi turunnya tingkat penyakit yang diakibatkan rokok.

Pada Tahun 2007, kasus pneumonia masih 247 kasus yang kemudian mengalami penurunan menjadi 218 kasus pada Tahun 2008 dan turun lagi menjadi 174 kasus pada Tahun 2009. Begitu pula untuk pengidap Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) yang terus menurun, meski tren penurunannya belum signifikan sebagaimana kasus pneumonia. Pengidap PPOK dalam tiga tahun terakhir dari 58 kasus pada Tahun

2007 menjadi 55 kasus Tahun 2008 dan 52 kasus Tahun 2009.

Penyakit lainnya yang juga diakibatkan perilaku merokok adalah jantung dan stroke. Untuk pengidap penyakit jantung trennya masih fluktuatif. Tahun 2007 terdapat 50 pengidap dan mengalami peningkatan menjadi 62 pengidap pada Tahun 2008 walau kemudian bisa ditekan kembali menjadi hanya 43 pengidap pada Tahun 2009. Adapun yang menunjukkan penurunan paling tajam adalah pengidap penyakit stroke. Jika pada Tahun 2007 terdapat 21 kasus maka dua tahun berikutnya turun drastis menjadi 18 kasus pada Tahun 2008 dan sembilan kasus pada Tahun 2009. **(ahmadsyam\_1@yahoo.com)**



## Profil

# The Fajar Institute of Pro Otonomi

## Latar Belakang/Awal Berdiri

Tepat 1 Januari 2001, otonomi daerah secara resmi diberlakukan. Banyak harapan terbit, tetapi banyak pula kekhawatiran serta tuntutan yang berkembang. Harapan muncul karena kebijakan nasional ini dipandang sebagai jalan baru untuk menciptakan tatanan yang lebih baik, yakni terciptanya *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebaliknya berkembang juga kekhawatiran bahwa kebijakan baru ini lahir dalam sejumlah kontroversi dan keterbatasan. Bukan tidak mungkin kebijakan tersebut justru menjadi pemicu bagi masalah-masalah baru yang lebih kompleks.

Sejalan dengan itu *Harian Fajar* sebagai koran nasional yang terbesar di Indonesia bagian timur pada tanggal 16 Juni 2008 memprakarsai terbentuknya sebuah lembaga yang bernama The Fajar Institute of Pro-Otonomi (FIPO).

## Visi dan Misi

**Visi FIPO** adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) demi kemajuan kabupaten-kota di Sulawesi Selatan.

**Misi FIPO** adalah mendorong inovasi dan kreativitas pemerintahan kabupaten-kota agar berlangsung kemajuan berkebebasan dan kebebasan berkemajuan (*development for freedom dan freedom for development*).

## Komisioner

FIPO terdiri dari satu orang Direktur Eksekutif, satu orang Direktur Program, satu orang Sekretaris Eksekutif, dan lima orang peneliti.

## Program Kegiatan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan berbasis pada kinerja pemerintah kabupaten-kota. Desain penelitian yang digunakan FIPO sistem monitoring dan evaluasi komparatif (*simonev-komparatif*), yaitu model monitoring yang memacu kompetisi antar kabupaten-kota se-Sulawesi Selatan.

Fokus dan lokus monitoring lembaga ini adalah pemerintah kabupaten dan kota. Untuk memberi efek kompetitif yang sehat bagi daerah yang dimonitoring, melalui lembaga ini pula dipublikasikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah kabupaten-kota dari tahun ke tahun.

## Bidang Penelitian

Hasil monitoring dan evaluasi FIPO dikemas dalam bentuk ranking kabupaten-kota dalam sembilan kategori. Kesembilan kategori tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi; pemerataan ekonomi; pemberdayaan ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan; pelayanan kesehatan;

pelayanan pendidikan; pelayanan administrasi dan kependudukan; partisipasi publik dan kesinambungan politik; akuntabilitas publik; dan pengelolaan lingkungan hidup.

### **Metode Penilaian**

Terdapat tiga metode penilaian yang digunakan:

1. Inovasi yang dibuat daerah
2. Persepsi/survei publik
3. Komponen data sekunder atau kondisi kabupaten-kota saat ini (*existing condition*) berupa analisis dokumen.



## Profil



### The Asia Foundation

The Asia Foundation adalah sebuah lembaga non-profit, non-pemerintah yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan kawasan Asia Pasifik yang damai, makmur, adil, dan terbuka. The Asia Foundation mendukung berbagai prakarsa di Asia untuk meningkatkan tata pemerintahan, hukum, dan masyarakat sipil; pemberdayaan perempuan; reformasi dan pembangunan ekonomi; pembangunan yang berkelanjutan dan lingkungan hidup; dan hubungan internasional. Belajar dari hampir 60 tahun pengalaman di Asia, The Asia Foundation bekerja sama dengan mitra non-pemerintah dan pemerintah untuk mendorong pengembangan kepemimpinan dan kelembagaan, tukar informasi, dan penelitian kebijakan. Dengan 18 kantor di seluruh Asia, serta kantor di Washington, DC (Amerika Serikat) dan kantor pusat di San Fransisco (Amerika Serikat), The Asia Foundation mencoba mengatasi berbagai permasalahan tersebut baik di masing-masing negara maupun tingkat regional.

Di Indonesia, melalui Program Tatakelola Pemerintahan Daerah dan Ekonomi, The Asia Foundation bekerja dengan berbagai mitra lokal –lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian, organisasi masyarakat, universitas di berbagai daerah di Indonesia– untuk menjalankan program-program yang bertujuan untuk mendorong tata pemerintahan daerah dan iklim usaha yang baik, terutama yang terkait dengan kelompok miskin, perempuan, serta usaha mikro, kecil dan menengah. Program-program The Asia Foundation termasuk advokasi perbaikan proses dan alokasi anggaran daerah yang lebih berpihak kepada kelompok miskin (*pro-poor*) dan sensitif gender, reformasi peraturan daerah, penyederhanaan birokrasi perizinan, penguatan partisipasi swasta dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, dan berbagai studi seperti tatakelola perekonomian daerah, studi anggaran daerah, biaya transportasi barang, dan sebagainya.

#### The Asia Foundation Indonesia

Jl. Adityawarman, 40 Kebayoran Baru  
Jakarta 12160

Phone : (021)-7278-8424

Fax : (021)-720-3123

Email : [general@tafindo.org](mailto:general@tafindo.org)

## Profil

# PT INCO, Tbk

## Visi dan Misi

PT International Nickel Indonesia Tbk (PT Inco) merupakan satu dari sedikit produsen nikel utama dunia. Selama lebih dari 40 tahun beroperasi di Indonesia, perusahaan banyak memberikan kontribusi bagi kemakmuran bangsa dan rakyat Indonesia, seperti menyediakan lapangan kerja, serta berkomitmen terhadap lingkungan hidup di mana perusahaan beroperasi. Kekuatan daya saing PT Inco terletak pada cadangan bijih yang berlimpah, tenaga kerja yang terampil dan terlatih, dan pembangkit tenaga listrik tenaga air berbiaya rendah.

PT Inco memiliki visi menjadi salah satu pemimpin produsen nikel utama dunia. Menjadi pemimpin berarti menjadi acuan bagi pertumbuhan, efisiensi, kesinambungan, dan reputasi bagi perusahaan semacam. Visi perusahaan adalah mengembangkan sumber daya Indonesia yang telah dipercayakan kepada perusahaan sehingga mencapai hasil maksimal yang bermanfaat bagi seluruh stakeholder.



Dok. Inco

Karyawan bagian rehabilitasi lahan pasca tambang PT Inco sedang meninjau perkembangan tanaman dan pohon di lahan pasca tambang di Sorowako.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, PT Inco menjalankan strategi :

### **Pertumbuhan**

Perusahaan memperluas kapasitas produksi dan penggunaan sumber daya guna memenuhi kebutuhan seluruh *stakeholder* dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Kontrak Karya.

### **Efisiensi**

Perusahaan meningkatkan efisiensi guna meningkatkan keuntungan dan mempersiapkan diri dalam menghadapi fluktuasi harga nikel.

### **Tenaga kerja**

Perusahaan memastikan semua tenaga kerja yang ada menjalankan strategi yang telah ditetapkan. Tenaga kerja di PT Inco merupakan tenaga kerja terlatih. Mereka bekerja dengan semangat tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat biaya.

### **Lisensi sosial**

Perusahaan berkomitmen untuk berkembang bersama masyarakat dalam operasinya.

### **Perlindungan aset**

Perusahaan bertanggung jawab secara aktif dalam melindungi aset-aset strategisnya.

### **Reputasi**

Perusahaan memastikan bahwa tindakan-tindakan yang diambil menunjukkan nilai-nilai yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata *stakeholder*.

PT Inco memproduksi nikel dalam matte yang dihasilkan dari bijih laterit dan diolah pada fasilitas terpadu dekat Sorowako, Sulawesi Selatan. Nikel dalam matte merupakan produk setengah jadi dengan kandungan nikel 78 persen, sulfur 20 persen, kobalt 1 persen, dan 1 persen material lainnya. Seluruh produksi PT Inco dijual berdasarkan kontrak jangka panjang.



Salah satu aktivitas pengangkutan bahan tambang di wilayah operasional tambang PT Inco di Sorowako

## Awal Berdiri

Didirikan pada Juli 1968 sebagai anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Vale Inco Limited (semula Inco Limited). PT Inco menandatangani Kontrak Karya awal dengan Pemerintah Indonesia pada 27 Juli 1968. Setelah penandatanganan tersebut, perusahaan memulai kegiatan eksplorasi di wilayah seluas 6,6 juta hektar. Sebagaimana diatur dalam Kontrak Karya, perusahaan kemudian melepaskan wilayah kontrak secara bertahap setelah menemukan wilayah yang lebih tepat sebagai daerah operasi. Luas wilayah Kontrak Karya PT Inco saat ini seluas 218.529 hektar, kurang dari 5 persen luas wilayah eksplorasi sebelumnya.

PT Inco memulai konstruksi pabrik pada Tahun 1973 dengan satu jalur pengolahan *pyrometalurgi* dan fasilitas-fasilitas terkait. Pada Tahun 1975 perusahaan memulai konstruksi dua jalur pengolahan tambahan dan satu instalasi pembangkit listrik dengan air. PT Inco memulai produksi komersial pertama pada April 1978.

Pada Tahun 1993 PT Inco berhasil menyelesaikan perluasan fasilitas pengolahan sehingga kapasitas produksi nominal per tahun meningkat dari 36.300 metrik ton nikel dalam matte menjadi 47.600 metrik ton.

Pada 15 Januari 1996 PT Inco menandatangani perjanjian perubahan perpanjangan Kontrak Karya pertama yang semula berakhir 1 April 2008 menjadi 28 Desember 2025. Sejalan dengan perpanjangan tersebut, PT Inco menyelesaikan ekspansi berskala besar pada 1999 sehingga kapasitas terpasang tahunan menjadi 68.000 metrik ton nikel dalam matte. Dibangun pula satu pembangkit listrik tenaga air baru di Balambano.

Pada Tahun 2003, untuk pertama kalinya PT Inco berhasil melampaui kapasitas terpasang dengan produksi 70.216 metrik ton. Sejak itu, perusahaan secara konsisten memproduksi nikel dalam matte di atas kapasitas tersebut.

## Saham Perusahaan

PT Inco mempunyai satu kelas saham, dan sebagai hasil pemecahan satu saham menjadi sepuluh yang disetujui oleh pemegang saham pada 17 Desember 2007– berlaku efektif pada 15 Januari 2008– saat ini terdapat 9.936.338.720 lembar saham yang beredar. Saham PT Inco pertama kali tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 16 Mei 1990, ketika 20 persen saham perusahaan ditawarkan kepada publik. Penawaran ini untuk memenuhi kewajiban perusahaan sesuai ketentuan dalam Kontrak Karya untuk mendivestasikan persentase tersebut kepada pembeli Indonesia.

Pada 31 Desember 2008, 60,8 persen saham PT Inco dimiliki oleh Vale Inco Limited dari Kanada dan 20,1 persen saham dimiliki oleh Sumitomo Metal Mining Co., Ltd dari Jepang. Sisanya, 19, 1 persen dimiliki oleh publik dan pemegang saham lainnya.

## Community Development (Comdev)

Meneguhkan komitmen untuk tumbuh dan berkembang bersama masyarakat PT Inco tetap melaksanakan program pemberdayaan masyarakat atau community development (comdev). Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, program comdev PT Inco Tahun 2008 tetap melanjutkan model penjarangan kebutuhan (*needs assessment*) yang partisipatif, transparan, dan bertanggung jawab. Hasilnya, pelan tapi pasti, masyarakat semakin matang dalam memberdayakan diri demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Program-program yang dilaksanakan oleh masyarakat lokal di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah memperlihatkan meningkatnya inisiatif dan partisipasi sehingga program menjadi lebih mandiri dan berkelanjutan. Didukung PT Inco dan pemerintah daerah tiga provinsi tersebut, masyarakat menggagas proposal-proposal program betul-betul memenuhi kebutuhan dan berdasarkan kondisi obyektif dan potensi yang dimiliki masyarakat.

Secara umum, program comdev PT Inco Tahun 2008 dan sesudahnya menunjukkan kemandirian dan berkelanjutan. Walaupun di sana-sini masih banyak yang mesti dibenahi, dengan dukungan dan bantuan seluruh *stakeholder*, upaya-upaya yang telah dilaksanakan diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal dan berlangsung secara berkesinambungan. Dalam hal ini, catatan yang patut dikemukakan adalah menyangkut *lesson-learned* penerapan model partisipatif.

Pertama, keyakinan bahwa model partisipatif bisa menjawab seluruh permasalahan yang dihadapi masyarakat ternyata tidak sepenuhnya benar. Fakta di lapangan menunjukkan, masyarakat terkadang hanya mampu menggambarkan masalah yang mereka hadapi tetapi tidak memiliki kompetensi untuk menemukan solusinya. Di sinilah peran perusahaan dan pemerintah daerah diperlukan dalam membantu masyarakat keluar dari permasalahannya.

Kedua, dalam pelaksanaan program, sinergi antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah adalah suatu keniscayaan. Diperlukan

koordinasi yang intensif antara perusahaan dan aparat pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Tanpa koordinasi, kemungkinan tumpang-tindihnya pelaksanaan program akan sangat besar. Hal ini tentu akan memboroskan anggaran.

Ketiga, kerjasama dan sinergi program bukan hanya dengan perusahaan dan elemen pemerintah kabupaten melainkan juga dengan pelaksana program pemberdayaan masyarakat yang dikoordinasi langsung pemerintah pusat seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD), dan lain sebagainya.

### Sektor Pendidikan



Dok. Inco

Di sektor pendidikan, PT Inco melanjutkan program Tahun 2006-2007 yakni mengupayakan meningkatnya mutu guru dan bantuan beasiswa bagi siswa berprestasi yang kurang mampu. Perusahaan juga menyediakan prasarana dan sarana pendidikan untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar.

### Sektor Kesehatan

Di sektor kesehatan PT Inco mendorong program-program yang menciptakan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan pencegahan penyakit. Program-program semacam itu terbukti lebih tepat sasaran dan efektif karena kesehatan terkait erat dengan terciptanya pola hidup sehat sejak dini. Beberapa program yang sudah dijalankan sebelumnya seperti bantuan pengobatan di fasilitas kesehatan PT Inco bagi masyarakat lokal, tetap dilanjutkan mengingat kebutuhan masyarakat lokal akan layanan kesehatan yang memadai masih tinggi. Perusahaan juga memfokuskan pada program pelatihan serta penyediaan prasarana dan sarana kesehatan. Kedua bidang ini mendapat perhatian



Dok. Inco

mengingat kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai di beberapa wilayah. Selain itu, melanjutkan program sebelumnya, pemetaan masalah kesehatan masyarakat menjadi perhatian. Dengan pemetaan (*health mapping*) yang komprehensif, PT Inco bersama pemerintah daerah dapat merancang program kesehatan yang lebih tepat sasaran dan efektif.

## Sektor UMKM

Di sektor UMKM, program-program yang dilaksanakan memperlihatkan keterlibatan kaum perempuan secara aktif. Mereka dapat menghasilkan produk-produk yang memenuhi kebutuhan lokal sekaligus menjadi sumber penghasilan keluarga dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Usaha pembuatan kue tradisional di Malili, misalnya, menunjukkan bagaimana kaum perempuan, khususnya ibu-ibu rumah tangga, menghasilkan penganan berbahan baku sagu lokal. Produk tersebut tidak hanya dijual di sekitar tempat tinggal mereka tetapi telah menjangkau kecamatan-kecamatan sekitarnya. Lebih menarik lagi, walaupun dari segi dana mendapat alokasi terkecil karena hanya bersifat stimulan, usaha kecil dan industri rumah tangga (*home industry*) yang sudah ada itu berkembang dengan baik. Hal ini berkat pelatihan dan lokakarya yang dilaksanakan untuk mengembangkan keahlian demi meningkatkan kualitas produk, manajemen usaha, dan pemasaran.

## Sektor Pertanian

Menyangkut program-program yang dilaksanakan, salah satu usaha yang patut dicatat di sektor pertanian adalah usaha budidaya rumput laut di Kecamatan Malili, Luwu Timur. Usaha ini memperlihatkan hasil yang memuaskan bukan saja dalam hal produksi melainkan juga dalam peningkatan keahlian, pengorganisasian kelompok tani, dan manajemen pemasaran. Hasilnya adalah semakin baiknya produksi rumput laut baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga petani dapat meraih keuntungan yang lebih besar.

## Sektor Sosial dan Budaya

PT Inco memprioritaskan sektor sosial dan budaya pada penguatan kapasitas dan peran organisasi masyarakat. Penguatan kapasitas merupakan langkah strategis untuk mengembangkan organ dan instrumen dalam masyarakat. Dalam konteks ini, penguatan kapasitas organisasi adalah dalam hal kepemimpinan, motivasi, arah, strategi, pengawasan, sistem dan prosedur, kerjasama, dan penanganan konflik.

## Alokasi Anggaran

Meski berpegang pada prinsip program mengikuti perencanaan biaya, PT Inco tidak membatasi besaran perencanaan biaya per sektor. Anggaran yang dialokasikan pada masing-masing program ditentukan berdasarkan *need assessment* dan rencana kerja yang telah disusun. Dengan total dana mencapai Rp47.029.896.716, selama Tahun 2008 ada enam sektor utama berdasarkan anggaran yang dialokasikan yakni: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) UMKM; (4) Pertanian; (5) Prasarana; dan (6) Sosial dan Budaya.

Besarnya anggaran untuk sektor prasarana disebabkan oleh besarnya kebutuhan masyarakat akan prasarana publik di sebagian besar wilayah pemberdayaan PT Inco. Di Kecamatan Nuha, misalnya, PT Inco membangun jalan untuk pemukiman masyarakat lokal di Sumasang dan memperbaiki

alur sungai-sungai yang melintasi wilayah pemukiman di Sorowako.

PT Inco juga membangun instalasi air bersih bagi warga di Kecamatan Nuha dan Wasuponda. Penyediaan air bersih merupakan bagian dari komitmen PT Inco untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat lokal di sekitar wilayah operasinya.

Sektor pendidikan juga mendapatkan porsi yang besar pada Tahun 2008. Ada empat bidang yang menjadi perhatian yakni: (1) peningkatan mutu guru; (2) beasiswa; (3) prasarana dan sarana pendidikan; dan (4) *public education*. Dari keempat bidang tersebut, anggaran pembangunan prasarana dan sarana pendidikan adalah yang terbesar, disusul bantuan beasiswa. Kondisi prasarana pendidikan yang tidak memadai terutama di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara memerlukan penanganan segera. Di sisi lain, kondisi ekonomi orangtua murid yang pas-pasan membuat program beasiswa tetap dibutuhkan.

Di sektor pertanian, program comdev menitikberatkan pada: (1) peningkatan produktivitas pertanian; (2) pertanian ramah lingkungan; (3) budidaya ulat sutera; (4) perikanan dan peternakan, serta (5) peningkatan budidaya rumput laut. Kelima upaya tersebut dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan pemerintah daerah, universitas, dan petani.

Sampai dengan akhir Tahun 2009, PT Inco memiliki 3.319 orang karyawan yang berlokasi di Sorowako, Makassar, Jakarta, dan lokasi-lokasi lain di sekitar Sulawesi dengan komposisi 99% tenaga kerja Indonesia dan 1% tenaga kerja asing, dimana 80% dari TKI tersebut adalah penerimaan setempat. Dalam melakukan rekrutmen, PT Inco diwajibkan oleh Kontrak Karya untuk memprioritaskan calon karyawan dari wilayah tempat kami beroperasi. Kami tetap berkomitmen untuk memenuhi kewajiban tersebut. Selain dari itu PT Inco juga mempekerjakan kurang lebih 3000 karyawan kontraktor dan berdasarkan studi LPEM Universitas Indonesia terkait *multiplier effect* Tahun 2007 dampak tidak langsungnya menciptakan kesempatan lapangan pekerjaan 63.,894 orang.

PT Inco selalu berupaya secara konsisten menghasilkan nilai bagi bangsa dan masyarakat Indonesia melalui tanggung jawab sosial perusahaan. PT Inco telah menunjukkan komitmen yang kokoh melalui dukungan terhadap inisiatif-inisiatif untuk memajukan pendidikan, ketrampilan, kesehatan, pengetahuan dan usaha kecil menengah (UKM), maupun hubungan yang meningkatkan kualitas hidup perorangan dan masyarakat secara keseluruhan. Pada Tahun 2009, PT Inco meningkatkan pengeluaran untuk tanggung jawab sosial perusahaan sebesar 54% dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi USD 7,2 juta, di tengah kondisi ekonomi dunia yang terus mempengaruhi bisnis PT Inco.

Pengeluaran-pengeluaran tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan melalui program Comdev yang difokuskan untuk memperbaiki pendidikan, ekonomi dan kualitas kesehatan daerah, mempromosikan kesehatan, menyediakan bantuan sosial dan kemanusiaan, dan membangun infrastruktur.

## Peran PT Inco Mengembangkan UKM

Di saat krisis ekonomi melanda dunia dan Indonesia, salah satu kelompok usaha yang tetap bertahan adalah kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Terpaan badai krisis hampir membuat kelompok usaha besar tergoncang, sementara untuk UKM pengaruh krisis ini hanya mempengaruhi bahkan hampir boleh dikatakan tidak ada. Tercatat, banyak usaha kecil dan menengah justru menjadi lebih mapan karena adanya krisis ekonomi. Salah satu kelebihan kelompok usaha ini karena sebagian besar mengandalkan pasar lokal, akan tetapi tidak jarang pula telah menembus pasar internasional sebagai imbas dari era perdagangan bebas.

Selain itu, PT Inco selalu berupaya untuk memegang teguh tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar lokasi operasionalnya melalui pengembangan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Program CSR PT Inco berjalan sangat dinamis searah dengan dinamisnya pemahaman terhadap CSR itu sendiri. Termasuk dinamisasi CSR perusahaan sebagai salah satu agen transformasi sosial kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

## CSR dan Pengembangan UKM

Menyadari posisi CSR perusahaan sebatas *support* terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tugas utama Pemerintah Daerah, implementasi CSR selalu mengacu kepada pola kemitraan antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat itu sendiri. Masyarakat Luwu Timur sebagian besar menggantungkan hidup dalam bidang usaha pertanian sehingga sebagian besar pula usaha kecil dan menengah di daerah ini erat hubungannya dengan bidang pertanian. Dalam upaya ikut serta dalam mengembangkan sektor UKM, CSR PT Inco melalui Program Comdev menetapkan beberapa prinsip yaitu:

1. Pengembangan UKM yang berbasis pada *Keunggulan Lokal*. Keunggulan lokal ditekankan pada sumber bahan baku yang banyak tersedia di daerah ini, hasil produksinya bisa menjadi Brand daerah, diminati oleh masyarakat dan di tetapkan sebagai produk unggulan oleh pemerintah daerah.
2. Pengembangan UKM *Ramah Lingkungan* dengan memaksimalkan pemanfaatan limbah menjadi bahan produksi yang memiliki nilai jual.
3. Memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengembangkan keunggulan lokal melalui pengembangan ekonomi *kreatif* dan *kemandirian*
4. Pengembangan UKM menekankan *reputasi* kelompok terutama menguatkan kelompok yang telah bertahan selama ini sebagai usaha, bukan usaha dadakan.

5. *Pengembangan SDM*. Agar produk yang dihasilkan dapat terus dikembangkan dan dipertahankan keunggulannya, maka perlu dilakukan pengembangan SDM melalui bimbingan, pelatihan dan bersama pemerintah daerah membangun Balai Pelatihan Industri Kayu di Lampia Desa Harapan, Kecamatan Malili.
6. Secara perlahan meninggalkan model *supply driven strategy* sebaiknya mulai ditinggalkan, dan memulai arah pengembangan program UKM yang berorientasi pasar yang didasarkan atas pertimbangan efisiensi (*market oriented, demand driven programs*)

Beberapa program yang telah dilakukan sebagai upaya (intervensi) pengembangan UKM di wilayah pemberdayaan PT Inco sebagai berikut:

1. Peningkatan SDM Pelaku Usaha Kecil Menengah melalui pelatihan-pelatihan, pendampingan, dan *Technical Assistance* lainnya.
2. Pengembangan Standar Mutu Hasil (*Product Quality Standart*) melalui pelabelan standar aman dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dan Dinas Kesehatan terhadap beberapa produk makanan dan minuman kelompok dampingan.
3. Membuka peluang bagi UKM dampingan menjadi *Mitra* usaha dan operasional PT Inco melalui promosi dan perkenalan hasil UKM kepada peluang pasar di lingkup perusahaan (Contoh: Pupuk Kompos di Program Penghijauan, Produk UKM di Koperasi Karyawan, dan Pertokoan Pemukiman Karyawan).
4. Penerapan *Teknologi Tepat Guna* pada Kelompok Usaha Kecil Menengah yang sudah berjalan secara tradisional seperti bantuan kemasan, label merek usaha, dan bantuan peralatan teknologi sederhana.
5. Program *Insentif (Modal Awal)* bagi usaha baru tetapi memiliki nilai *kompetitif* dan *sustainability* yang tinggi.



Dok. Inco

Salah satu kegiatan penanaman dan perawatan lahan pasca tambang di wilayah operasional tambang PT Inco di Sorowako.

## Best Practices

### A. Koperasi Pemuda Pupuk Kompos dan Bibit Tanaman Lokal di Sorowako dan Wasuponda

Koperasi ini berawal dari sebuah kelompok pemuda potensial tetapi belum menemukan peluang kerja yang menjanjikan. Dari kelompok pemuda menjadi sebuah lembaga ekonomi mikro berupa KOPERASI PEMUDA. Di Kecamatan Nuha, kelompok pemuda ini membentuk Koperasi Pemuda BPPD (Badan Perencanaan Pembangunan Desa) dan di Kecamatan Wasuponda kelompok pemuda ini membentuk Koperasi yang namanya MEGA LESTARI. Kedua koperasi pemuda ini berkecimpung di usaha produksi pupuk kompos dan bibit tanaman lokal. PT Inco memberikan Technical Assistance dan insentif bantuan modal usaha untuk memproduksi pupuk sesuai dengan standar kebutuhan program penghijauan (Reklamasi Purna Tambang) yang membutuhkan banyak sekali pupuk kompos dan bibit tanaman lokal. Setelah berproduksi beberapa kali dan standar mutu produksi sudah memenuhi syarat, akhirnya kedua koperasi ini menjadi penyedia dan pemasok pupuk kompos utama dan bibit tanaman lokal bagi kebutuhan program penghijauan PT Inco Tbk.

Rata-rata PT Inco memerlukan pupuk kompos sekitar 5000 ton per tahun. Kegiatan pupuk kompos dan bibit tanaman lokal dari koperasi ini melibatkan sekitar 30 orang.

### B. Usaha Konveksi di Sorowako

Pengembangan konveksi ini di kembangkan dari potensi pemuda di Sorowako yang tidak sempat tertampung sebagai tenaga kerja (karyawan) di PT. Inco. Kelompok ini di kelola oleh sekitar 15 tenaga kerja pemuda dan perempuan. Usaha ini telah mendapat bantuan peralatan, bimbingan teknis oleh ahli konveksi dan modal usaha dari program CSR PT. Inco. Sampai sekarang usaha telah memproduksi pakaian yang berkualitas.

### C. Usaha Briket Limbah Kayu di Towuti

Usaha ini dimulai dengan melirik bahan baku dari limbah *sawmill* yang tersedia melimpah di seputaran Kecamatan Towuti. Limbah tersebut selama ini menjadi ongkongan yang tidak bermanfaat sama sekali. Akhirnya melalui bimbingan dan pelatihan, limbah tersebut dapat di jadikan sebagai sumber energi alternatif berupa briket (bahan bakar) yang dapat menggantikan posisi minyak tanah dan gas. Masyarakat Towuti dapat memanfaatkan limbah menjadi bahan bakar murah dan ramah lingkungan.

### D. Usaha Kue Sagu di Malili

Sagu adalah salah satu makanan pokok masyarakat Luwu Timur. Potensi sagu juga melimpah di daerah ini. Kebiasaan masyarakat daerah ini mengkonsumsi sagu dengan berbagai bentuk makanan termasuk salah satu makanan ringan yang sangat di kenal di daerah ini adalah BAGEA SAGU. Penganan ini sudah di produksi turun temurun, akan tetapi masih

terbatas pada produksi secara sangat tradisional sehingga produk ini belum bisa di pasarkan ke daerah lain di karenakan kualitas produksi belum layak promosi. Melalui pelatihan pengolahan makanan sehat, bantuan kemasan, pelatihan standar mutu produksi dan labelisasi sehingga penganan ini sudah bisa di pasarkan sampai ke pasar regional bahkan sudah bisa menjadi oleh oleh khas Malili bagi tamu daerah atau tamu perusahaan. PT Inco juga membantu promosi penganan ini dalam berbagai kesempatan untuk mengikuti pameran tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

### **E. Usaha Pengolahan Hasil Perikanan di Malili**

Karakteristik Kecamatan Malili yang sebagian besar wilayahnya adalah pesisir, sehingga potensi pengembangan usaha rumah tangga pengolahan hasil perikanan menjadi familiar bagi masyarakat. Usaha seperti ikan kering, abon ikan, dan terasi menjadi ciri khas di wilayah ini. Keterbatasan akan pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu kendala pengembangan usaha masyarakat, sementara keterlibatan masyarakat khususnya kelompok perempuan cukup tinggi. Intervensi program CSR berupa pelatihan, pendampingan, bantuan peralatan dan modal usaha di harapkan bisa menambah nilai jual usaha kelompok dampingan. Terasi dan ikan kering Malili sudah sangat terkenal sampai di beberapa kota besar di Indonesia sebagai oleh oleh khas Malili atau Sorowako.

### **F. Usaha Mebel di Towuti**

Usahan mebel ini mulai didirikan pada tahun 2004 yang dipimpin oleh Sindrang Daeng Gaswan dengan nama Usaha Mebel Mandiri. Usaha ini melibatkan sekitar 20 pekerja yang dapat menghasilkan beragama perabot rumah tangga mulai dari kursi tamu, meja, lemari, tempat tidur, hingga kusen, pintu, dan bingkai jendela. Rata-rata per bulan dapat menghasilkan 7 produk bahkan lebih bila ada permintaan dari



konsumen. PT Inco memberikan bantuan peralatan sekaligus sebagai modal awal. Harga produknya tergantung dari bentuk dan jenis kayu yang dipesan. Rata-rata harga produknya berkisar mulai dari Rp1 juta – Rp20 juta.



Dok.Inco

### **G. Kerajinan Limbah Plastik di Towuti**

Sekelompok ibu rumah tangga yang terdiri sekitar 10 orang berinisiatif memanfaatkan limbah plastik yang banyak ditemukan di sekitar lingkungan mereka di Kecamatan Towuti. Untuk itu, mereka mencoba mendirikan UKM yang bernama Mekar Sari. Kelompok ibu rumah tangga ini memanfaatkan limbah plastik dengan menghasilkan beberapa produk seperti kap lampu, kotak tisu atau perhiasan, kotak untuk ulang tahun atau bingkisan dan berbagai asesoris lainnya. Harga produknya berkisar antara Rp5.000 hingga Rp50.000 . Melalui pemanfaatan limbah plastik, para ibu rumah tangga itu mendapatkan pendapatan

tambahan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. PT Inco memberikan bantuan modal usaha kepada sekelompok ibu rumah tangga ini. Belakangan mereka juga mengembangkan usaha ke kerajinan rotan bekerja sama salah seorang warga Kecamatan Towuti yang pernah bekerja di industri kerajinan rotan di Cirebon. Hasilnya, kelompok ini sudah mampu menghasilkan beragam kerajinan rotan berupa kursi, meja, tempat koran, dan perabotan rumah tangga lainnya. Selain bantuan modal usaha, PT Inco membantu dengan peralatan untuk kerajinan rotan ini. Bahan baku untuk kerajinan rota ini diperoleh dari Kecamatan Towuti dan sekitarnya.

### **F. Usaha Daur ulang kertas bekas di Sorowako**

Sekelompok pemuda yang peduli lingkungan membentuk Sorowako Green Community pada Tahun 2010. Salah satu usaha dari Sorowako Green Community ini adalah memanfaatkan sampah kertas dari rumah tangga dan PT Inco untuk didaur ulang menjadi produk seperti kertas dan amplop. Usaha ini melibatkan sekitar 10 hingga 15 orang. Sebagian produknya dibeli oleh PT Inco untuk keperluan kantor. PT Inco membantu peralatan untuk usaha daur ulang kertas bekas ini.

### **H. Usaha Keramba Jaring Apung**

PT Inco bekerja sama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Pemkab Lutim bersama kelompok nelayan di Kecamatan Malili mengembangkan Budidaya Perikanan dan Kelautan. Program ini dirancang untuk merangsang semangat entrepreneurship/kewirausahawan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir laut Kabupaten Luwu Timur dengan pelatihan dan pembinaan intensif SDM Luwu Timur menjadi seorang pekerja keras, bertanggung jawab sebagai pembudidaya yang handal. Untuk menghindari ketergantungan masyarakat, program ini dikemas dalam pembinaan KEMANDIRIAN BERUSAHA dengan model kepemilikan keramba secara kredit sistem perbankan.

Dalam waktu 1 sampai 2 kali panen akan menciptakan masyarakat yang bertanggungjawab dalam berusaha secara mandiri dan menjadikan perikanan Luwu Timur menjadi sektor unggulan di masa yang akan datang tanpa menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah daerah maupun PT Inco. Secara lebih detail ada dalam paparan tersendiri karena memerlukan modal yang cukup banyak sekitar Rp2 miliar lebih. Selain itu, di Malili, dikembangkan usaha rumput laut, pengembangan kapasitas petani rumput laut, dan gudang rumput laut. Usaha ini merupakan juga salah satu upaya peningkatan pendapatan bagi masyarakat pesisir di Luwu Timur. Untuk mendapatkan harga yang layak dan relatif stabil, PT Inco menggandeng perusahaan pengolahan rumput laut untuk menyerap hasil petani rumput laut ini.



## Tentang Penulis/Editor



**Sukriansyah S. Latief**

Direktur Eksekutif FIPO

Me*M*eski lembaga ini baru terbentuk Tahun 2008 lalu, namun upaya untuk menghidupkan lembaga tersebut terus dirintisnya. Uki, begitu dia akrab disapa memulai karier di Harian Fajar sejak Tahun 1990 sebagai reporter, dan saat ini dipercaya sebagai Direktur Produksi dan SDM Media Fajar Grup dan Pimpinan Redaksi Harian Fajar. Kecintaannya pada dunia pendidikan tidak membuat dirinya berhenti pada jenjang pendidikan strata satu (S1) Strata dua (S2) dan S3 di bidang hukum terus digelutinya hingga berhasil meraih gelar doctor Tahun 2009. Sebagai lembaga independent, Uki selalu menekankan agar para peneliti selalu menjaga independensi, kredibilitas dan kepercayaan. Dengan tiga hal tersebut, FIPO akan terus tumbuh sebagai suatu lembaga yang akan mendukung tujuan pelaksanaan otonomi daerah yakni terciptanya kesejahteraan masyarakat.

([sukriansyah88@yahoo.com](mailto:sukriansyah88@yahoo.com))



**Basir Kadir**

Direktur Program FIPO

L*L*ahir di Makassar 28 Februari 1968. Memulai karier sebagai wartawan di Harian Fajar hingga posisi redaktur pada beberapa desk. Jiwa peneliti yang kuat membuat ia diberi amanah sebagai Kepala Litbang Harian Fajar. Jelang kelahiran The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) 16 Juni 2008, ia dipercayakan untuk mengawaki lembaga baru tersebut.

Dalam perjalanannya, lembaga independen ini sudah dua tahun berturut-turut mempersembahkan Otonomi Awards kepada kabupaten-kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang pantas mendapatkannya melalui serangkaian penelitian dan survei.

Upaya yang dilakukan dengan sepenuh hati ini, tidak hanya mendapat simpati dari sejumlah lembaga donor, tapi juga pemerintah Amerika Serikat. Awal Juli Tahun 2010, ia diundang untuk mengikuti International Visitor Leadership Program (IVLP) ke Amerika Serikat dengan mengunjungi lima negara bagian untuk melihat berbagai hal, termasuk pola pemerintahan negeri Paman Sam.

([basirkadir@yahoo.com](mailto:basirkadir@yahoo.com))



### Nurdin Tappa

Sekretaris Eksekutif FIPO

Lahir di Belawa-Wajo, 12 Februari 1974. Alumni Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin ini bergabung di Harian Fajar sebagai staf Penelitian dan Pengembangan pada Maret 2003. Tahun 2005 ditunjuk sebagai staf Lembaga Pengembangan SDM PT. Media Fajar. Di lembaga ini dia ditugaskan melaksanakan workshop, lokakarya dan kegiatan pelatihan bagi wartawan/karyawan Media Fajar Grup agar menjadi insan-insan profesional yang cerdas. Berdirinya FIPO tidak terlepas dari peran pria ini. Saat The Fajar Institute of Pro Otonomi terbentuk, dia diberi tanggung jawab mengirim proposal ke beberapa lembaga donor untuk berpartisipasi pada kegiatan penelitian FIPO. Kerja kerasnya membuahkan hasil saat Pemprov Sulsel dan Canadian International Development Agency (CIDA) setuju untuk bekerjasama. Tekadnya yang besar untuk menyukseskan program-program FIPO membuat dia senantiasa hidup bersemangat.

(nurdintp\_st@yahoo.com)



### Milawaty

Peneliti

Lahir di Makassar 7 Mei 1976. Tahun 2001 menyelesaikan studinya pada Sastra Inggris dan gelar Magister Manajemen tahun 2003 di Universitas Hasanuddin. Guna melengkapi gelar kesarjanaannya agar linear dengan gelar S2-nya, ia kembali kuliah di Fakultas Ekonomi pada salah satu sekolah tinggi ekonomi di Makassar dan selesai tahun 2006. Tahun 2007-2008 sebagai tenaga pengajar pada salah satu sekolah tinggi manajemen informatika dan komputer di Makassar. Tahun 2008 sebagai peneliti the Fajar Institute of Pro-Otonomi (FIPO) Fajar Group yang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah di Sulawesi Selatan.  
(m\_milawaty@yahoo.com)



### Ahmad Syam

Peneliti

Lahir di Jeneponto, 14 Agustus dan meraih sarjana Ilmu Pemerintahan, FISIP-Universitas Hasanuddin. Sejak mahasiswa terlibat pada gerakan kemahasiswaan termasuk menjadi inisiator Forum Kajian Insani (FKI) Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP-Unhas pada 1993. Bekerja sebagai jurnalis di sejumlah media 2002-2004. Aktif sebagai kontributor The Jakarta Post ketika menetap di Canberra, Australia pada 2006-2007. Sebelum bergabung di FIPO sebagai peneliti, juga pernah menjadi asisten peneliti dalam suatu riset tentang water supply system kerjasama Unhas dan Waterloo University, Canada pada 2002. (ahmadsyam\_1@yahoo.com)



### Andi Mattingaragau Tenrigau

Peneliti

Lahir di Sabbang-Luwu Utara, 13 Maret 1972. Sewaktu mahasiswa dipercaya sebagai Ketua Badan Penerbitan Pers dan Jurnalistik Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (BPPJ-PMII) Cabang Ujung Pandang periode 1997-1998. Tahun 1998 menyelesaikan studi di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Jurusan Akuntansi. Tahun 2000-2001 bekerja di Perusahaan Daerah Luwu sebagai Kepala Bagian Pemasaran dan Perencanaan. Tahun 2001 sebagai pengajar Universitas Andi Djemma Palopo. Alumni pada Program Studi Manajemen Keuangan Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2003. Tahun 2004 bekerja di BUMN - PT. Industri Kapal Indonesai (Persero) pada Bagian Akuntansi. Kini, rutinitas kesehariannya, selain sebagai peneliti FIPO juga aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi di Sulsel.

(andimattaringaragau@yahoo.com)



**Sundari Usman**

Peneliti

Lahir di Belopa, 28 Oktober 1985 bergabung di lembaga penelitian The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) yang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah di Sulawesi Selatan pada awal 2009. Alumni Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Hasanuddin (Unhas) tahun 2007 ini sementara mengenyam pendidikan pada Pascasarjana FISIP Unhas Program Studi Administrasi Pembangunan mengambil Konsentrasi Kebijakan Publik.  
([andha\\_85@yahoo.co.id](mailto:andha_85@yahoo.co.id))